

ABSTRAK

HASRIATI. Model *Participatory Governance* (Perumusan Kebijakan Adat Bissu Segeri Kabupaten Pangkep) (Dibimbing Oleh Muhammad Tahir Dan Rulinawaty Kasmad)

Participatory Governance berfokus pada pendalaman keterlibatan demokratis dengan melalui partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan *good governance*. Akan tetapi hal ini tidak diterapkan di Kabupaten Pangkep yang melibatkan masyarakat marginal bissu dalam proses perumusan kebijakan yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model *participatory governance* (perumusan kebijakan adat bissu Segeri Kabupaten Pangkep). Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dan tipe fenomenologi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan : (a) Tidak adanya kebijakan yang berhubungan dengan bissu dan pelibatan para bissu. Bissu pada zaman dulu yang dihormati oleh masyarakat dan segala kebutuhan diberikan oleh kerajaan. Berbeda halnya dengan bissu zaman sekarang yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan sawah arajang telah diambil alih oleh pemerintah dan masyarakat, yang mengakibatkan berkurangnya minat para bissu untuk tetap beratraksi dalam berbagai kegiatan kebudayaan; (b) Pemerintah menyadari bahwa bissu adalah aset kebudayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkep dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk tetap melestarikan kebudayaan ini seiring dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan semakin terkikisnya budaya bissu(c) Dari segi keterlibatan masyarakat marginal dalam proses meningkatkan efisiensi dan pengelolaan layanan publik dapat dikatakan masih kurang hal ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebudayaan yang dimiliki dan hanya digunakan pada saat waktu-waktu tertentu untuk beberapa kepentingan dalam agenda pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan kebudayaan antar Kabupaten dan Provinsi. Budaya bissu adalah aset kebudayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Pangkep. Seiring dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan semakin terkikisnya budaya bissu dan terjadinya penjualan kebudayaan hal ini dikarenakan kurangnya perhatian para aparat pemerintah dalam melestarikan kebudayaan ini.

Kata Kunci: *participatory governance*, perumusan kebijakan, adat bissu